BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Perbuatan melawan hukum di dunia maya (*cyber crime*) merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya¹. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan dimasa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*².

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan

¹ Kabib Nawawi, Sahuri Lasmadi, Ardi Saputra Gulo, Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020, [https://www.google.com/search?q=jurnal+fakultas+hukum+unja+tentang+ alat+bukti+tindak+pidana+penipuan+online&og](https://www.google.com/search?q=jurnal+fakultas+hukum+unja+tentang+alat+bukti+tindak+pidana+penipuan+online&og).

² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Journal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi", <https://www.neliti.com/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>

menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.³

Perkembangan teknologi di era digital saat ini semakin berkembang cukup pesat dan penggunaanya meningkat sangat tajam. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Dapat dilihat dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri dan kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah dalam berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus terjadi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi agar tidak ketinggalan zaman.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja. Namun juga sebagai transaksi jual beli. Perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan sebuah metode baru dalam hal jual beli, dimana berbelanja tidak harus dilakukan di toko, pasar dan mal. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk

³ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 3

melakukan transaksi jual belinya, cukup melalui jaringan internet atau yang biasa disebut dengan istilah jual beli online shop.

Bisnis jual beli online semakin marak, tiap hari bermunculan berbagai macam tawaran bisnis dan penawaran produk secara online. Jual beli online belakangan ini sangat diminati oleh para pembeli. Karena belanja menjadi lebih praktis, hemat tenaga dan waktu, bisa mendapatkan barang dari mana saja dari luar kota bahkan luar negeri serta biasanya harganya lebih murah dari biasanya. Dengan kelebihan-kelebihan dari jual beli online tersebut membuat masyarakat lebih memilih berbelanja online dibandingkan berbelanja langsung. Dengan tingginya minat masyarakat dalam belanja online membuat toko online pun kini semakin banyak dan berkembang di negara Indonesia.

Beberapa waktu belakangan ini, jual beli online melalui media sosial adalah cara berbelanja yang sering digunakan dalam transaksi jual beli. Belanja melalui media sosial dianggap lebih mudah dibandingkan melalui aplikasi jual beli online. Dalam jual beli online melalui sosial media pembeli dapat leluasa berkomunikasi dan mendapat respon yang sangat cepat dari penjual. Untuk melakukan pemesanan juga tidak dibuat repot cukup dengan komunikasi melalui chat saja. Tidak harus mengisi formulir pembelian atau sebagainya.

Begitu banyaknya minat masyarakat dalam belanja online membuat banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak dan menguntungkan diri sendiri. Dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan jual beli online seperti perbuatan menipu terhadap pembeli yang dilakukan oleh penjual ketika pembeli sudah

melakukan pembayaran melalui ATM namun ternyata setelahnya penjual tidak mengirimkan barang kepada pembeli. Bahkan menghapus jejaknya dari pembeli. Kejahatan tersebut dilakukan tidak dengan kekerasan atau menggunakan sarana berat seperti bom atau pistol cukup dengan menggunakan sarana komputer atau handphone.

Dengan mudahnya masyarakat berbelanja tanpa adanya tatap muka, melainkan hanya melalui jaringan internet saja di sinilah lahirnya istilah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat berpedoman terhadap Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, yaitu: “suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.” Para pihak dalam pembuatan kontrak elektronik diharapkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdt agar kontrak yang telah dibuat para pihak tersebut menjadi sah dan legal oleh hukum. Dalam peraturan perundang-undangan pasal 46 PP Nomor 71 Tahun 2019 juga menjelaskan mengenai kontrak elektronik dan syarat-syarat, yaitu;

1. “Traksaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
2. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;

- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu dan;
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

Perjanjian jual beli online melalui kontrak elektronik rawan terjadi penipuan, disebabkan karena dalam proses jual beli pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan terkadang diantara pihak penjual dan pembeli tidak saling mengenal. Berdasarkan pasal 1320 KUHPdt maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum yaitu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum, selain konsekuensi hukum perdata diatas dapat juga berdampak terhadap konsekuensi hukum pidana dan UU ITE yang berlaku positif di Indonesia.

Untuk mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, terutama dalam masalah penipuan maka pelaku usaha dan konsumen wajib memperhatikan dan mematuhi Undang-Undang. Pelaku usaha dan konsumen wajib memiliki itikad baik dan menanamkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses transaksi jual beli online, sehingga perjanjian jual beli online tidak rawan terjadinya penipuan. Seperti yang tertulis dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa;

1. “Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada pihak;
2. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak wajib memperhatikan;
 - a. Itikad baik;

- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Kewajaaran.”⁴

Secara Nasional, peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam undang-undang tersebut menjelaskan secara luas bagaimana seharusnya proses dalam transaksi jual beli dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Adapun jika konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap penjual sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Selain UUPK yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam proses jual beli online, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan curang. Penipuan termasuk dalam perbuatan curang karena pelaku melakukan sebuah kebohongan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP, merumuskan sebagai berikut

:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.⁵

Di Indonesia tindak pidana penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur subjektif dari Pasal 378 adalah :
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri.
 - b. Melawan hukum.
2. Unsur objektif dari Pasal 378 adalah :
 - a. Barang siapa.
 - b. Menggerakkan orang lain atau orang lain tersebut.
 1. Menyerahkan suatu benda
 2. Mengadakan suatu perikatan utang.
 3. Meniadakan suatu piutang
3. Dengan memakai :
 - a. Sebuah nama palsu.
 - b. Suatu sifat palsu.
 - c. Tipu muslihat.
 - d. Rangkaian kata kata bohong.⁶

Dalam KUHP tersebut menjelaskan perbuatan curang secara umum sedangkan peraturan yang menjelaskan perbuatan yang dilarang secara khusus dalam jual beli online di atur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang yaitu menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan pada pasal 45A ayat (1) menjelaskan sanksi yang diberikan terhadap pasal 28 yaitu dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Tindak pidana penipuan Online tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHP

⁵ Penjelasan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Penjelasan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai *lex generalis*, namun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik yang kemudian diroboh menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai undang-undang yang *lex specialis*.

Kasus kejahatan penipuan jual beli online banyak terjadi di media sosial salah satunya yaitu media Facebook dan Instagram. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir seluruh kalangan mempunyai akun Facebook dan Instagram baik itu kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Melakukan transaksi jual beli online di media Facebook sangat mudah dilakukan. Cukup dengan memposting jualan/produk yang diperjual belikan di akun penjual bahkan dapat grub atau komunitas jual beli. Pengguna Facebook hanya perlu membuat grup jual beli online dan bagi siapa yang ingin melakukan transaksi jual beli cukup hanya bergabung digrup jual beli tersebut. Transaksi jual beli barang dalam media sosial dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu memasukkan identitas asli. Sehingga banyak yang menggunakan akun bohong/identitas palsu yang menyebabkan mudah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak.

Sebagai contoh terjadi kasus penipuan yang dialami oleh salah satu Ibu rumah tangga yang bernama Ernawati (36 Tahun) warga Desa Pulau Melako Kabupaten Sarolangun. Awalnya korban bermain media sosial Instagram dan melihat akun si penjual menjual baju gamis dengan harga yang sangat murah sehingga korban menjadi tertarik. Tanpa berpikir panjang korban berkomunikasi dengan penjual, melakukan pemesanan dan mentransfer uang ke rekening si penjual. Tidak lama setelah korban melakukan transfer pelaku pun memblokir

akun korban untuk menghilangkan jejaknya dari korban. Kemudian korban pun melakukan pelaporan melalui situs kridibel.co.id. karena dianggap lebih praktis dibanding melapor ke pihak kepolisian. Namun korban tidak mendapatkan tindak lanjut dari hasil pelaporan melalui kridibel.

Kridibel adalah sebuah situs yang dapat mengidentifikasi apakah seseorang berpotensi melakukan penipuan atau tidak, berdasarkan keluhan dan laporan pengguna yang pernah bertransaksi dengan orang tersebut. Sehingga melalui situs kridibel masyarakat dapat melihat jumlah kasus penipuan dan nomor rekening yang banyak dilaporkan sebagai penipu. Namun korban yang melakukan pelaporan melalui situs kridibel tidak mendapatkan tindak lanjut untuk kasus yang dialami. Korban hanya dapat melaporkan saja. Sehingga jika korban hanya melakukan pelaporan melalui situs kridibel saja tidak mendapatkan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pelaku dan tidak ada efek jera untuk pelaku. Korban perlu melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian agar mendapatkan tindak lanjut.

Di Sarolangun sendiri telah banyak terjadi kasus penipuan jual beli online. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sarolangun terdapat 48 jumlah kasus penipuan jual beli online yang membuat laporan ke pihak kepolisian Polres Sarolangun terhitung sejak tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 11, pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 37. Namun tingkat penyelesaian kasus yang dilaporkan belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penipuan jual beli online di Sarolangun meningkat sangat pesat. Sebagian besar penyebab terjadinya kasus penipuan jual beli online di Sarolangun karena korban tertarik dengan harga

miring yang ditawarkan oleh pelaku. Padahal korban dan pelaku tidak saling mengenal. Korban melakukan transaksi melalui online dengan cara memesan barang dan kemudian melakukan pembayaran. Namun setelah barang dipesan dan uang sudah ditransfer barang yang dipesan tidak diterima oleh korban.

Tabel
Jumlah Kasus Penipuan Online di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Dari Tahun 2020-2021

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2020	11	Proses Penyidikan
2	2021	37	Proses Penyidikan
Total		48	

Berdasarkan data-data diatas membuktikan bahwa masih banyak terjadi kasus penipuan jual beli online. Dapat dilihat bahwa kasus penipuan online selama tahun 2020 sampai tahun 2021 yang berjumlah 48 kasus masih dalam tahap proses penyidikan dan belum ada kasus yang sudah dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Penyidik masih belum mendapatkan bukti yang lengkap untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya. Meskipun masyarakat telah memiliki upaya agar tidak terjadi lagi kasus penipuan jual beli online namun tetap diperlukan upaya kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan badan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Tujuan tersebut meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi juga memiliki kewenangan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi kasus Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun) .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Polres Sarolangun?
2. Apa kendala yang dihadapi tim penyidik kepolisian Sarolangun dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Polres Sarolangun.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi tim penyidik kepolisian Sarolangun dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online.

2. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

1. Upaya Penanggulangan

“Upaya Penanggulangan adalah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal”⁷. Sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan upaya penanggulangan adalah :

Upaya penanggulangan dapat dilakukan salah satunya upaya lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁸

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit,

2022 ⁷ <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/> diakses tanggal 12 Maret

⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hal. 72.

kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.⁹

Menurut Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak.”¹⁰

3. Penipuan Online

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".¹¹ Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.

⁹ Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)

¹⁰ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hal. 83

¹¹ <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses 11 November 2021

- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan melalui online adalah suatu peristiwa penipuan melalui media sosial adalah peristiwa dimana seorang pengguna media sosial, salah satunya adalah Facebook, menerima pesan dan atau permintaan untuk melakukan atau memberikan sesuatu, biasanya berupa uang atau barang, dari seorang pengguna lain yang dikenalnya melalui media yang sama.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu penjatuhan atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tiga teori pidana yaitu:

- a. Teori Absolute (*vergerldingstheorien*)

Teori absolute menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹³

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hal.31.

Menurut J.E. Sahetapy, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata – mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu di timbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.

b. Teori Tujuan (doeltheorien) atau Teori Relatif.

Teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbulah teori tujuan. Teori ini memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori ini terbagi menjadi dua bagian, pertama teori pencegahan umum (algemene preventive atau general preventive).¹⁴ Teori ini ingin mencapai tujuan dari pidana, yaitu semata - mata untuk membuat jera semua orang agar mereka tidak melakukan kejahatan - kejahatan. Sementara teori tujuan khusus (bijondere preventie, atau speciale preventie) mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah penjahat dalam mengulangi lagi kejahatannya, dengan memperbaikinya lagi.

c. Teori Gabungan

Selain teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yaitu teori gabungan. Teori ini menggabungkan antara teori absolute dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolute dan teori relatif)

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010. hal.16.

sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan– kelemahan yaitu¹⁵:

- 1) Kelemahan Teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangan bukti– bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan Teori Relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut– nakuti sulit dilaksanakan. Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:
 - a. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpenjara dari kemungkinan menanggulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat.
 - b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas

¹⁵ Koes Wadji, *Perkembangan Macam - Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet ke- I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 11-12.

dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

- c. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana di bantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

- a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan

bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

b. Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

F. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Sarolangun karena penulis tertarik untuk meneliti upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah hukum Polres Sarolangun.

2. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu berbentuk deskriptif.

Deskriptif maksudnya adalah dengan memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala dalam suatu kelompok tertentu.¹⁶ Di dalam penelitian

¹⁶Amirussin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 8.

deskriptif, penulis menganalisis data dan menggambarkan secara jelas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah hukum polres Sarolangun.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melihat secara langsung bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.

Menurut Bambang Sunggono mengatakan bahwa:

Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.¹⁷

Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- f. Teorinya kebenarannya korespondensi

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 43.

- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.¹⁸

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrimsus *Cyber Crime* Polres Sarolangun yang ditugaskan sebagai penyidik.
- b. Sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel responden *Purposive Sampling*, yaitu

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 124-125.

dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap berkaitan dan mengetahui dengan permasalahan yang diteliti:

1. Kepala Ditresimsus Cyber Polres Sarolangun
2. 2 (dua) orang anggota Penyidik

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dengan responden yang telah ditentukan dengan memakai pedoman wawancara yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu cara pengumpulan data-data dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta

dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Menguraikan tentang pendahuluan, pendahuluan merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tentang tinjauan pustaka, tinjauan pustaka merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan Teori Penanggulangan Kejahatan, dan Tindak Pidana Penipuan Online.

BAB III Menguraikan tentang Hasil dan Pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan bab di mana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi kasus di Polres Sarolangun)

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisi